



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710

TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402

WEBSITE : WWW.DJPBN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S- 7128 /PB/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian LKKL Semester I Tahun 2016 Revisi

7 September 2016

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum
Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) semester I tahun 2016, kami telah menerima dan melakukan analisis LKKL semester I tahun 2016. Berdasarkan analisis yang kami lakukan terdapat beberapa permasalahan pada LKKL sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang tidak disusun dari seluruh satker di lingkup K/L-nya;
2. Terdapat beberapa neraca LKKL yang tidakimbang (*balance*), sehingga neraca tersebut tidak memenuhi persamaan dasar akuntansi;
3. Pada beberapa Laporan Operasional (LO) K/L terdapat akun-akun yang tidak semestinya pada LKKL antara lain:
 - Akun Pendapatan Perpajakan;
 - Akun Pendapatan Hibah;
 - Akun Beban Lain-lain;
4. Pada beberapa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) terdapat penyajian akun-akun pada LKKL yang tidak wajar atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, antara lain:
 - Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan;
 - Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas
 - Transaksi Antar Entitas termasuk selisih transfer keluar dan transfer masuk
5. Terdapat perbedaan data Persediaan dan Aset Tetap antara LKKL dengan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) pada beberapa K/L bernilai di atas Rp. 500 Miliar;
6. Pada beberapa K/L, terdapat perbedaan data belanja (*suspen*) antara SPAN dengan K/L bernilai di atas Rp. 1 Miliar.

(Detail permasalahan masing-masing K/L terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL dan LKPP dan mengantisipasi audit atas LKKL tahun 2016, kiranya permasalahan di atas harus segera diselesaikan.

Terkait hal tersebut, kami meminta Saudara untuk menyusun kembali dan menyampaikan LKKL semester I tahun 2016 Revisi kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal **26 September 2016**. Kami mengharapkan LKKL tersebut telah dianalisis secara mendalam, agar LKKL semester I tahun 2016 dan periode selanjutnya dapat menyajikan transaksi-transaksi keuangan secara wajar.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Marwan Harjowiryo
NIP. 195906061983121001

Tembusan :
Menteri Keuangan RI

Lampiran I Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor : S- 7128 /PB/2016
Tanggal : 7 September 2016

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALA/WAKIL
KEPALA/ DIREKTUR UMUM KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

No.	Daftar Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
2.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
3.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
4.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
5.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
6.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
7.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
8.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
9.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
17.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
18.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
19.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
20.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang
21.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
22.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
23.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
24.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
25.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
26.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
27.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
28.	Direktur SDM & Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia